

Petugas Dituntut Angkat Citra LP

MI, 28/04/18.

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly meminta seluruh petugas lembaga pemasyarakatan (LP) untuk melakukan terobosan jika ingin menciptakan suatu perubahan. Ia pun menuntut agar petugas LP serius dalam menjalankan tugasnya.

“Untuk mewujudkan LP yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif tentunya petugas LP harus serius,” terang Yasonna saat memimpin upacara peringatan Hari Pemasyarakatan Ke-54 di Kantor Ditjenpas, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, petugas LP jangan lagi hanya melaksanakan tugas yang sama dari hari ke hari. Terlebih untuk menciptakan kesan LP yang baik, petugas harus melakukan terobosan, dimulai dari mengubah pola pikir dalam bekerja sehingga menjadi lebih baik.

Jangan lagi, lanjutnya, terjadi hal-hal yang menurunkan citra petugas LP. Salah satunya ialah menerima suap atau menjadi perantara masuknya narkoba ke dalam lingkungan LP.

“Kalau ada niat baik, semua pasti bisa dilakukan, meskipun memang sulit untuk mengubah cara pikir kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keburukan, tapi saya yakin itu bisa dilakukan,” jelas Yasonna.

Petugas harus melakukan terobosan, dimulai dari mengubah pola pikir dalam bekerja sehingga menjadi lebih baik.

Dia menegaskan, perubahan pola pikir sejumlah petugas LP di Tanah Air harus segera dilakukan. Terlebih skema *restorative justice* segera diterapkan sehingga pelaku pidana ringan tak akan dimasukkan ke LP.

Kemenkum dan HAM pun akan segera memerintahkan seluruh jajaran agar selalu bertindak baik dan membuang segala praktik kotor yang sering terjadi di LP. Hal ini nantinya akan juga berhubungan dengan sistem promosi di jajaran LP.

“Kami tidak akan asal-asalan dalam memberikan jabatan kepada petugas kalau memang dia memiliki kompetensi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkum dan HAM meluncurkan pemberian hak kepada narapidana (napi) melalui sistem *online*. Pemberian hak itu berupa pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi napi.

Dengan peluncuran sistem itu, Kemenkum dan HAM memangkas proses hak napi yang dahulu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kemenkum dan HAM juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga diharapkan tidak ada petugas LP yang bermain dalam pemberian hak kepada napi. (Opn/P-4)